

STRATEGI ADAPTASI PETANI MISKIN DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERTANIAN DI PEDESAAN SUMATERA BARAT

(Studi Kasus Masyarakat Nagari Sungai Tanang)

Dr. Erwin, M.Si

ABSTRACT

This article studies about the change of social economic function and the dynamic of land management in nuclear family at rural areas in West Sumatra. In Nagari Sungai Tanang, the increase of population threatens the existence of inherited wealth which caused the change of structure from matrilineal extended family to nuclear family. The research use qualitative approach, data was analysed by emic approach and etics analyse was conducted to formulate the research conclusion and hypothesis compilation. The massive-ness of land pawning caused by economical factors and land fragmentation caused by demographical pressures. The structure change of land ownership from communal to individual caused the function of social economic of matrilineal extended family, it cause the protection to old people, orphan and widow become less. The strategy of matrilineal nuclear family in fulfilling the life needs as a result from interaction between the rareness of farm land and developing market, which is structure in producing organization in the farm land; the movement from profit sharing system to the rental system; intensification and disenclosure of farm land use. Tights relation of right and obligation in consanguinity system and reciprocal exchange among individual in society start to become weaker and smaller together. To the group of society, that stage result in the decrease of social security in quantity and quality. The change at the level infra-structure caused the change of family structure and the structure of land ownership, but it doesn't influence to the supra structure level. The ideology of matrilineal system still remain conceptual, although there's the change at the level of infra-structure and structure, the society of Sungai Tanang stay remains to the Islam and custom rules.

Key Words: Adaptation, Peasant Poor, Land Pawning and Communal land

I. PENDAHULUAN

Salah satu masalah pembangunan yang dihadapi Indonesia adalah tidak optimalnya program peningkatan taraf hidup masyarakat yang secara langsung menyentuh mayoritas penduduk di daerah perdesaan. Berbagai upaya telah dilakukan, namun masalah ketimpangan pembangunan perdesaan terjadi di berbagai tempat. Dalam beberapa hal, program pembangunan justru memberikan dampak negatif pada masyarakat perdesaan, seperti terjadinya proses pemiskinan, menurunnya inisiatif masyarakat, melemahnya solidaritas sosial dan kurangnya peran jaring pengaman sosial yang berbasis komunitas.

Jaminan Sosial dalam masyarakat merupakan implementasi dari bentuk-bentuk perlindungan, baik yang diselenggarakan oleh negara, maupun institusi-institusi sosial yang berbasis komunitas, terhadap individu dari resiko-resiko tertentu dalam hidupnya (Benda-Beckmann, 2001 dan Midgley, 2005). Di banyak negara berkembang, institusi sosial yang memberikan perlindungan terhadap individu-individu dalam masyarakat adalah institusi keluarga dan lembaga-lembaga sosial yang berbasis agama dan kebudayaan (Benda-Beckmann, 2001 dan Midgley, 2005). Namun, peran dari institusi keluarga dalam perkembangannya berkurang, karena kebanyakan keluarga di negara-negara

berkembang, seperti Indonesia merupakan keluarga miskin.

Lembaga sosial adalah organisasi sosial yang dibentuk oleh masyarakat, berfungsi sebagai sarana untuk memberikan perlindungan terutama berkaitan dengan papan, sandang dan pangan terhadap warga masyarakat. Ada berbagai bentuk mekanisme perlindungan oleh institusi sosial yang ada dalam masyarakat, seperti; pemberian modal usaha, pemberian alat produksi dan pemberian santunan kepada anak yatim, piatu, lanjut usia dan warga masyarakat lainnya, untuk memenuhi kebutuhan papan, pangan dan sandang. Konsep jaminan sosial dalam keluarga dapat diartikan sebagai pemberi perlindungan, terutama berkaitan dengan papan, sandang, pangan dan rasa aman terhadap individu-individu yang menjadi anggota dalam sebuah keluarga (Benda-Beckmann, 2001).

Proses modernisasi, secara nyata telah memberikan pengaruh terhadap pola hubungan sosial dalam masyarakat (Soetrisno, 1999 dan Winarno, 2003). Nilai-nilai yang mengutamakan kebersamaan, tolong menolong yang menjadi ciri dari masyarakat pedesaan mulai melemah, pada hal nilai-nilai tersebut menempatkan individu secara sosial dan ekonomi terjamin kehidupannya. Proses modernisasi berpengaruh terhadap struktur keluarga dan berimplikasi terhadap perlindungan anggota keluarga, seperti; cepatnya masa kanak-kanak, tingginya intensitas konflik dalam keluarga dan mulai berkurangnya pemberian pelayanan kepada orang tua lanjut usia.

Kasus pada masyarakat Sungai Tanang, perubahan sistem ekonomi pertanian dari pertanian subsistensi ke pertanian yang berorientasi pasar, dipercepat karena pesatnya perkembangnya pasar Padang Luar sebagai sentra pemasaran horticultura di Sumatera Barat dan tingginya laju pertumbuhan penduduk (Durin, 2000 dan Ummah, 2003).

Berangkat dari gejala tingginya laju pertumbuhan penduduk dan terbatasnya lahan pertanian yang dimiliki keluarga akan berpengaruh terhadap cara-cara yang ditempuh keluarga untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupannya. Penelitian ini mengidentifikasi pola pengelolaan lahan pertanian dan organisasi atau perkumpulan yang digunakan oleh masyarakat untuk

mengatasi berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat pedesaan. Penelitian ini mengambil lokasi di nagari Sungai Tanang, dengan 2 (dua) pertimbangan; 1. Nagari Sungai Tanang merupakan salah satu nagari inti, dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. 2. Sistem pemilikan dan penguasaan tanah mekanismenya beragam.

II. PROFIL NAGARI PENELITIAN

Nagari Sungai Tanang secara sosial budaya (adat) tidak terpisahkan dari nagari Padang Luar. Secara administratif Nagari Sungai Tanang termasuk dalam Kecamatan Banuhampu Sungai Puar, terletak di kaki Gunung Singgalang, berjarak kurang lebih 8 Km dari Kota Bukittinggi. Topografi Nagari mirip dan bergelombang, dengan curah hujan yang cukup tinggi 2100 mm pertahun. Luas nagari berjumlah 421 Hektar dengan perincian sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1: Tata Guna Lahan

No	Peruntukan Lahan	Luas
1	Perkampungan /Perumahan	81 Ha
2	Sawah (Lahan Pertanian Basah)	36 Ha
3	Gurun (Lahan Pertanian Kering)	284 Ha
4	Hutan Negara	20 Ha
	Jumlah	421 Ha

Sumber: Diolah dari data primer

Mata pencaharian utama dari masyarakat bekerja sebagai petani. Berbeda dengan petani di banyak tempat lainnya di Sumatera Barat, di mana tanaman yang akan ditanam tidak untuk dikonsumsi oleh keluarga, melainkan untuk dijual. Nagari Sungai Tanang termasuk salah satu daerah penghasil sayur mayur dan tanaman palawija. Jenis tanaman sayur mayur dan palawija yang ditanam oleh masyarakat adalah sebagai berikut : Saledri, Buncis, Kentang, Cabe merah, Wortel, Bawang merah, Sayur manis, Terong, Kacang Panjang, Kacang tanah, Arcis, Tebu. Penduduk Nagari Sungai Tanang berjumlah 2379 jiwa, dengan komposisi pada tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk

No	Usia	Jumlah
1	0-9 tahun	454
2	10-19 tahun	604
3	20-59 tahun	1148
4	Ditatas 60 tahun	173
	Jumlah	2379

Sumber: Diolah dari data primer

III. TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai kebijakan pembangunan pertanian perdesaan ditujukan dalam upaya meningkatkan produktifitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. Modernisasi pertanian dalam wujud: intensifikasi dan mekanisasi dalam pengelolaan lahan, telah melahirkan berbagai masalah seperti; uniformitas bibit padi, kerusakan ekosistem sawah karena penggunaan peptisida, meningkatnya angka pengangguran dan ketidakadilan ekonomi (Saragih, 2001 dan Winarno, 2003).

Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Perubahan perilaku individu terstruktur dan merupakan reaksi adaptif terhadap lingkungan yang cenderung berubah, terpetakan dan melahirkan berbagai pilihan pada individu dan setiap keluarga pada masyarakat pedesaan. Menurut Wolf (1983:23), petani berusaha mencari keseimbangan antara kemampuan dan tuntutan dari luar, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Ada kalanya masyarakat petani menempuh dua cara yang saling bertentangan, yaitu meningkatkan produksi atau mengurangi konsumsi. Kedua cara tersebut, merupakan pilihan yang tersedia dalam kehidupan petani. Apabila mereka memilih untuk menekan konsumsi, hal ini berarti mereka akan membatasi jenis dan jumlah dari barang yang mereka konsumsi, agar dapat menekan biaya hidup keluarga atau petani berusaha untuk memperbesar produksi melalui jalan meningkatkan kinerja pada lahan yang mereka kelola agar produktivitas meningkat.

Kondisi sumber daya alam memegang peranan penting sebagai sarana produksi dalam sistem pertanian dan erat sekali kaitannya dengan konsep properti yang ada

dalam masyarakat. Konsep properti komunal secara normatif mengatur pola dan mekanisme pemanfaatannya, yang mencerminkan adanya pembagian hak bersama, pengendalian dan pembatasan akses serta keuntungan secara bersama. Dalam perkembangannya, sebagaimana yang dikemukakan oleh Murphree, 1996 dan Chaudry, 2002, dengan konsep penguasaan properti berbasis masyarakat.

Penerapan teknologi pertanian, seperti introduksi bajak, sistem irigasi dan proses industrialisasi secara langsung mempengaruhi struktur dan fungsi keluarga. Produksi subsistence diganti dengan produksi untuk pasar dan ekonomi uang. Peranan wanita sebagai produsen makanan berkurang, sedangkan peranan ekonomi laki-laki akan diperkuat. Apabila laki-laki berhasil memperoleh harta pribadi, harta itu kemudian diwariskan kepada anak-anaknya, dan tidak kepada kemenakannya. Semua faktor tersebut mempengaruhi pola menetap setelah menikah, karena anggota masyarakat kurang terikat kepada ladang sebagai sumber ekonomi, maka keharusan untuk tinggal di tengah keluarga matrilinealnya berkurang.

Pada masyarakat Sungai Tanang, faktor keterbatasan tanah pertanian yang dimiliki keluarga inti matrilineal, telah melahirkan berbagai strategi yang dilakukan masyarakat agar kebutuhan keluarga terpenuhi. Pada bagian ini akan dibahas usaha-usaha apa saja yang dilakukan keluarga inti matrilineal untuk mengatasi keterbatasan tanah pertanian; organisasi produksi, terutama mengenai hubungan kerja, sistem bagi hasil dan sistem sewa dan pola pemanfaatan tanah untuk menghasilkan surplus dalam produksi pertanian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Pola Pengelolaan Lahan Pertanian Tata Guna Lahan

Usaha untuk mewujudkan kesejahteraan petani sangat tergantung pada keberadaan sumber daya alam dan optimalisasi penggunaannya (Mosher, 1978). Pada masyarakat Nagari Sungai Tanang, pola pemanfaatan dapat dibagi atas dua bentuk; lahan pertanian basah dan lahan pertanian

kering. Pengertian dari lahan basah adalah areal pertanian yang dapat ditanami dengan tanaman padi sawah. Sedangkan lahan kering adalah areal pertanian yang tidak dapat ditanami padi sawah, dan petani menyebutnya dengan istilah "gurun". Selanjutnya untuk kedua pengertian di atas, akan dipakai istilah lahan basah dan lahan kering

Menjadikan tanaman padi sebagai tanaman sela untuk menyuburkan tanah agar tanaman horticultura tumbuh dengan baik, merupakan keputusan yang di dasarkan pada pengalaman bertahun-tahun petani, dan sangat erat sekali kaitannya dengan sempitnya areal pertanian yang mereka miliki dan sistem pengairan yang masih tradisional. Menanam tanaman lain, selain tanaman padi, merupakan suatu bentuk adaptasi petani, dalam usaha menyeimbangkan antara kemampuan dengan tantangan dunia luar. Suatu hal yang rasional, selama kebutuhan keluarga belum terpenuhi, maka seluruh anggota keluarga akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Lahan basah dengan segala sifatnya, berbeda dengan lahan kering. Perbedaan tidak saja berhubungan ekosistemnya, tetapi juga terkait dengan proses pengolahan, tenaga kerja yang terlibat, pola tanam, jenis tanaman yang di tanam dan sejumlah perbedaan lainnya. Lahan basah di Nagari Sungai Tanang, terletak pada dataran-dataran rendah di sekitar lembah, atau setidak-tidaknya di daerah yang landai di lereng perbukitan. Sumber air dan saluran irigasi, merupakan tuntutan yang paling mendasar dari lahan basah atau ekosistem sawah. Daerah sekitar lembah sangat ideal untuk ekosistem sawah. Anak sungai yang mengalir dari gunung Singgalang jumlahnya terbatas, sehingga tidak dapat mengairi areal persawahan di sepanjang aliran anak sungai. Kondisi ini sedikit menyulitkan bagi masyarakat untuk menjadikan daerah disekitar aliran anak sungai untuk dijadikan sebagai lahan basah.

Ketersediaan air untuk mengairi areal pertanian basah dapat di kelompokkan atas tiga katagori, yaitu (1) lahan pertanian basah dengan ketersediaan air terbatas. Terdapat di Jorong Salimparik dan Jorong Pandam gadang (besar). (2) lahan pertanian basah dengan ketersediaan air cukup. Terdapat di Jorong Sungai Tanang gadang (besar) dan Sungai Tanang ketek (kecil). (3) Lahan pertanian basah

dengan ketersediaan air cukup, dengan sistem isrigasi. Terdapat di Jorong Sungai Tanang gadang dan Jorong Sungai Tanang kecil.

Konsekuensinya, untuk katagori pertama, terdapat satu sumber air, yang digunakan untuk mengairi areal pertanian di enam tempat. Distribusi air diatur sedemikian rupa, dengan pembagian pada setiap tempat atau areal selama tiga bulan. Konsekuensinya, pada setiap lahan atau areal, hanya dapat ditanami padi satu kali dalam 18 bulan. Katagori kedua, terdapat dua buah sumber air yang masing-masing digunakan untuk mengairi areal pertanian di empat tempat. Distribusi air pada setiap tempat, selama empat bulan. Konsekuensinya areal pertanian basah di Jorong Salimparik hanya dapat ditanami tanaman padi 1 kali dalam 16 bulan. Katagori ketiga, air tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga setiap saat atau setiap waktu dapat ditanami dengan tanaman padi.

Sejak tahun 1980, pasar Padang Luar mengalami perkembangan pesat menjadi pusat perdagangan sayur mayur dan palawija di Sumatera Barat. Pemasaran sayur dan palawija, oleh para pedagang tidak saja di jual di pasar-pasar Nagari di Sumatera Barat, akan tetapi juga dibawa oleh para pedagang antar propinsi, seperti ke Pekanbaru, Jambi, Bengkulu dan Palembang. Keadaan tersebut, secara langsung telah mempengaruhi tata guna lahan dan pola tanam pada masyarakat Nagari Sungai Tanang, terutama pada lahan basah yang ketersediaan airnya termasuk katagori cukup, dimana tanaman padi tidak lagi menjadi tanaman pokok masyarakat.

Menurut petani, menanam tanaman padi lebih ditujukan untuk mengembalikan kesuburan tanah. Pola tanam masyarakat mulai berubah, kalau selama ini pola tanam yang dipakai adalah padi-palawija-padi, sekarang menjadi terbalik dengan pola tanam yang dipakai adalah palawija-padi-palawija. Berbeda dengan lahan pertanian basah yang terdapat di Jorong Pandam Gadang dan Jorong Salim-parik, sejak tahun 1980 an, justru memperkuat pola tanam yang dibiasakan oleh petani, dan petani semakin intensif dalam pengolahan lahan. Pola tanam lama adalah padi-palawija-bera, sedangkan pola tanam baru adalah padi-palawija-palawija, dan tidak lagi ada masa bera.

Keberanian dan pilihan yang diambil oleh petani, untuk menjadikan tanaman padi sebagai tanaman sela dan bertujuan untuk menyuburkan tanah, merupakan keputusan yang didasarkan pada pengalaman bertahun-tahun, dan sangat erat sekali kaitannya dengan sempitnya areal pertanian dan sistem pengairan yang masih sangat tradisional. Menanam tanaman sayur mayur dan palawija merupakan suatu bentuk respons petani di Sungai Tanang, dalam usaha menyeimbangkan kemampuan dengan tantangan dunia luar. Suatu hal yang rasional, dan tidak saja berlaku pada masyarakat petani, selama kebutuhan keluarga belum terpenuhi, maka seluruh anggota keluarga akan bekerja untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Menurut para petani, menanam tanaman padi bertujuan untuk mengembalikan kesuburan tanah, walaupun lahan tersebut telah diberi banyak perlakuan, pemupukan, pemberian peptisida dan perawatan lainnya, hasilnya tidak memuaskan. Pengalaman dari bapak raja Malano, sejak tahun 1990 sampai sekarang hasil lahan semakin menurun, pada hal biaya produksi menjadi semakin besar.

Ketersediaan air di lahan basah berpengaruh terhadap jenis komoditi dan biaya produksi. Di lahan basah yang ketersediaan airnya cukup biaya produksi rendah, dibandingkan dengan biaya produksi pada lahan pertanian kering. Biaya produksi rendah di lahan basah ketersediaan air cukup, karena jumlah tenaga kerja yang diperlukan untuk menggarap lahan yang luasnya sama dengan lahan basah yang ketersediaan airnya termasuk dalam katagori terbatas, berbanding 1 : 2. Artinya untuk luas lahan pertanian yang sama diperlukan tenaga satu orang untuk mengerjakannya di lahan basah, sedangkan untuk lahan kering diperlukan dua orang tenaga. Menurut petani jumlah pupuk dan peptisida yang diperlukan juga berbeda, antara di lahan basah dengan di lahan kering.

Kalau hasil panen baik, dan harga pasar juga baik, maka pada waktu itulah masyarakat dapat memperbaiki rumah, membeli ternak atau menebus gadai. Untuk tanaman kentang misalnya : dengan bibit kentang 300 Kg, harga bibit 1 Kg Rp 1300,-, total Rp 390.000,- ditambah dengan pupuk dan peptisida Rp 100.000,- dan tenaga kerja sekitar Rp

200.000,-, total modal yang dikeluarkan sebanyak Rp 690.000,- kalau hasil panen baik, diperoleh hasil kurang lebih 1800 Kg dengan perbandingan 1 Kg bibit, hasil 6 Kg. Dengan mematok harga jual untuk 1 kg kentang sebesar Rp 1000,- (harga normal), maka di peroleh hasil sebesar Rp 1.800.000,- Dari hasil tanaman kentang dengan umur kentang lima sampai dengan enam bulan, akan didapatkan keuntungan sebesar Rp 1.100.000,- Kalau panen gagal, baik disebabkan oleh faktor hama atau karena faktor cuaca, maka hasil yang diperoleh sangat sedikit. Menurut informasi yang diperoleh dilapangan, kadang-kadang bibit saja tidak kembali. Resiko kegagalan panen, dapat saja terjadi setiap waktu, sedangkan modal yang diperlukan sangat besar.

Kegagalan panen, seringkali menyebabkan petani tergantung pada orang-orang tertentu atau terpaksa menyewakan tanahnya kepada orang lain untuk menutupi biaya produksi, terutama berkaitan dengan bibit, pupuk dan peptisida. Menurut informan, tanaman yang memiliki prospek yang baik, juga memiliki resiko kegagalan yang tinggi, sehingga tidak semua petani mau menanam tanaman yang modal produksinya tinggi..

Harga sayur mayur atau palawija yang dijual oleh petani kepada pedagang pengumpul, fluktuasi harga sangat cepat dan tinggi sekali. Pengamatan di pasar Padang Luar, Fluktuasi harga tinggi dan tidak dapat dikontrol oleh petani. Papan harga komoditi pertanian yang ada di pasar, baru ditulis pada sore hari dan tidak dapat dipedomani oleh petani. Maksudnya adalah, pada waktu pagi sekitar jam 9.00, harga cabe Rp 8.000, perkilogram, akan tetapi sekitar jam 12.00, dapat saja naik menjadi Rp 10.000, per-kilogram, dan sekitar jam 15.00 wib turun menjadi Rp 3000 perkilogram. Atau sebaliknya pada pagi hari harganya murah, siang, mulai mahal dan pada sore hari harganya paling tinggi. Dengan dasar itu, masyarakat Sungai Tanang, menyebut hasil pertanian atau dagangan mereka dengan sebutan barang yang tidak bersuku. Maksud, bersuku adalah, komoditi yang harganya sangat labil.

4.2. Hubungan Kerja di Lahan Pertanian

Pada masyarakat Nagari Sungai Tanang tidak terlihat adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Hubungan kerja dalam usaha tani menunjukkan pola hubungan yang relatif sederhana. Faktor ketersediaan air menentukan pola hubungan kerja di lahan pertanian, sebagaimana terlihat adanya perbedaan yang berarti dalam penggerjaan lahan pertanian basah dibandingkan dengan lahan kering.

Hubungan kerja yang dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada prinsip tolong menolong, sebagaimana yang terdapat pada masyarakat di pedesaan Jawa disebut dengan gotong royong. Prinsip resiproksitas merupakan sebuah prinsip moral yang mendasari kegiatan-kegiatan sosial dalam banyak masyarakat petani di Asia Tenggara, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan tetangga dan lingkungan komunitas. Di Philipina pola persekutuan antara perseorangan pada umumnya ditafsirkan dalam rangka resiproksitas, adanya keyakinan setiap jasa yang diterima oleh seseorang, maka jasa yang ia terima, diminta atau tanpa diminta ia harus membela, dan rasa malu atau rasa berhutang budi merupakan daya penggeraknya. Menurut Scoot (1981) saling tolong menolong dalam masyarakat petani berakar pada prinsip saling membutuhkan. Tolong menolong dalam bekerja di sawah atau di ladang sampai tahun 80-an masih sering dilakukan oleh masyarakat. Namun sejak tahun 1980-an, tolong menolong di lahan pertanian mulai menghilang. Namun, sejak tahun 1980-an sampai sekarang kegiatan-kegiatan seperti itu sudah mulai ditinggalkan.

Pada umumnya wanita dalam arti ibu rumah tangga akan membantu suami pada waktu luang, dengan berbagai kegiatan untuk dapat membantu menambah penghasilan rumah tangga. Juga ditemui banyak sekali wanita dalam arti ibu rumah tangga yang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan pendapatan, untuk membantu ekonomi rumah tangga. Artinya, keterlibatan istri dalam kegiatan yang mendatangkan pendapatan hampir sama dengan suami.

Wanita dalam arti ibu rumah tangga, disamping mengerjakan tugas-tugas rutin sehari-hari yang dilakukan wanita ibu rumah

tangga, juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan pendapatan. Perubahan Pola Kerja Wanita dengan memahami tingkat pendidikan wanita dalam dua generasi, dalam hal ini wanita dalam arti ibu rumah tangga dan dalam arti anak, nampaknya tidak terlihat perubahan tingkat pendidikan yang berarti dalam dua generasi tersebut. Tidak terjadi perubahan tingkat pendidikan, sekaligus juga tidak membuat adanya perubahan pekerjaan yang dilakukan oleh wanita. Kondisi ini sekaligus juga tidak merubah persepsi wanita terhadap jenis pekerjaan yang dapat dilakukan wanita, terbatas pada pekerjaan dengan tingkat produktifitas yang dikategorikan rendah oleh masyarakat

Dengan memahami jumlah anak dan komposisi umur dari anak-anak dalam keluarga, terlihat ada korelasi antara jumlah anak dan komposisi umur dari anak-anak terhadap jam kerja produktif dari ibu rumah tangga, untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan pendapatan. Dilihat dari jam kerja rata-rata dalam satu hari dari ibu rumah tangga untuk pekerjaan-pekerjaan yang mendatangkan pendapatan, tidak ada hubungan antara jam kerja rata-rata dalam satu hari dengan besarnya tingkat pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja rata-rata antara enam jam sampai dengan 10 jam dalam satu hari.

Dengan menelusuri variabel-variabel yang diduga berpengaruh terhadap pendapatan yang diperoleh ibu rumah tangga, seperti; bentuk pemilikan tanah, jenis komoditi yang di tanam dan ketiga modal. Nampaknya ketiga variabel tersebut sangat berpengaruh terhadap tingkat pendapatan para ibu rumah tangga. Untuk wanita ibu rumah tangga yang bekerja sebagai sebagai petani dan pedagang, dimana lahan pertaniannya adalah milik sendiri, mempunyai pendapatan lebih besar dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang menggarap lahan pertanian orang lain dengan sistem sewa atau bagi hasil, karena harus mengeluarkan bagian untuk pemilik tanah. Sistem bagi hasil atau sistem sewa mekanismenya sangat bervariasi. Kedua, jenis tanaman yang ditanam, bagi ibu rumah tangga yang menanam tanaman kentang dan cabe akan mempunyai pendapatan lebih besar dibandingkan dengan ibu rumah tangga yang

menanam tomat dan sayur-sayuran. Sedangkan variabel modal mempunyai korelasi dengan jenis tanaman yang ditanam, seperti untuk tanaman cabe dan kentang, akan memerlukan biaya yang besar, baik untuk pembelian bibit maupun untuk biaya pemeliharaan.

Di samping itu ibu rumah tangga yang mempunyai modal dapat membeli hasil pertanian dari petani lain, sehingga dagangan yang dibawa ke pasar menjadi semakin bervariasi. Ada perbedaan pendapatan yang cukup berarti antara ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani dengan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang. Dengan membandingkan jam kerja rata-rata dalam satu hari, terlihat pendapatan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai pedagang mempunyai pendapatan antara Rp 25.000,- sampai dengan Rp 30.000,-per/hari, sedangkan ibu rumah tangga yang bekerja sebagai petani mempunyai pendapatan antara Rp 7.500,- sampai dengan Rp 15.000,-per/hari.

4.3. Pola Hubungan yang Memungkinkan Petani Miskin

Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk cara yang telah melembaga pada masyarakat Sungai Tanang, bagi keluarga yang mempunyai lahan pertanian terbatas atau tidak mempunyai lahan pertanian, untuk memperoleh tanah garapan. Prinsip dasar dari sistem bagi hasil adalah pemilik sawah menyerahkan hak pengolahan sawahnya pada orang lain untuk diolah dan hasilnya nanti dibagi sesuai dengan perjanjian. Bagi petani penggarap mengolah tanah orang lain dengan sistem bagi hasil, prinsipnya hampir sama dengan ia memperoleh upah dari pekerjaan yang dia lakukan.

Alasan petani pemilik kenapa menyerahkan tanah kepada petani penggarap, disebabkan karena petani pemilik tidak lagi bekerja sebagai petani. Salah seorang petani menyebutkan, sistem bagi hasil ini sebenarnya menguntungkan petani penggarap, karena semua biaya produksi di luar tenaga akan ditanggung petani pemilik. Bagi petani penggarap itu disebut dengan orang yang menyadui sawah orang lain. Ada beberapa alasan yang dikemukakan oleh orang yang menyadui, sebagian besar dari informan

menyebutkan karena mereka tidak lagi memiliki lahan pertanian atau mereka sedikit memiliki lahan pertanian. Alasan lain yang dikemukakan oleh informan adalah karena mereka pada tahun-tahun tertentu ingin memperoleh pendapatan lebih karena mereka akan melangsungkan perkawinan dari anak-anak mereka, dan ada juga sebagian kecil dari petani menyebutkan hasil panen dari sawah yang mereka garap akan digunakan untuk membiayai pendidikan dari anak-anak mereka di masa datang.

Ada kecenderungan pelepasan hak atas tanah, tanah yang semula merupakan tanah komunal dijual kepada siapa saja yang mau membeli, tidak harus kepada saudara atau kepada orang senegari. Keadaan ini mulai menimbulkan kekhawatiran pemuka masyarakat. Kasus di nagari Padang luar, hampir 30 % dari penduduknya merupakan orang luar yang berasal dari nagar lain di Sumatera Barat.

Hubungan antara keluarga petani penggarap dengan petani pemilik dalam sistem bagi hasil dapat dikatakan akrab. Untuk petani penggarap yang tidak punya hubungan saudara, hubungannya bersifat vertikal, sedangkan untuk petani penggarap yang berasal dari saudara dekat dalam keluar luas matrilineal, pola hubungan yang terjadi tetap bersifat horizontal. Menurut Scoot (1981) hubungan patron klien mempunyai ciri-ciri khusus yang berbeda dengan hubungan sosial lainnya. Perbedaannya terletak pada beberapa hal; (1) interaksi tatap muka diantara pelaku yang bersangkutan; (2) adanya pertukaran benda dan jasa yang relatif tetap berlangsung diantara para pelaku; (3) adanya ketidaksamaan dan ketidakseimbangan dalam pertukaran barang dan jasa; dan (4) ketidakseimbangan tersebut menghasilkan katagori patron dan klien yang memperlihatkan ketergantungan dan ikatan yang meluas antara patron dan kliennya.

Hubungan antara petani pemilik dengan petani penggarap dapat disebut dengan hubungan yang bersifat vertikal, yang biasanya disebabkan karena petani pemilik akan mempunyai kedudukan sosial ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan dengan petani penggarap. Kalau dipahami hakekat dari pola hubungan antara petani pemilik dengan petani penggarap yang bersifat patron klien,

nampaknya kurang tepat apa yang dikemukakan oleh Scoot (1981) tentang adanya ketidakseimbangan pertukaran benda dan jasa diantara mereka. Hal ini disebabkan karena hubungan tersebut adalah hubungan yang terbentuk karena diantara kedua belah pihak saling membutuhkan. Bagi petani penggarap dapat memberikan bantuan tenaga kepada petani pemilik dan petani pemilik dapat memberikan bantuan dalam bentuk uang atau beras atau barang kebutuhan hidup lainnya kepada petani penggarap.

Sistem sewa tanah merupakan salah satu cara untuk memperoleh akses terhadap tanah, munculnya sistem sewa, lebih disebabkan karena kebutuhan masyarakat akan tanah meningkat, dan petani kecil dan buruh tani yang tidak mempunyai modal akan mengalami kesulitan untuk memperoleh tanah. Mekanisme tradisional, seperti sistem bagi hasil cenderung tergeser oleh pola hubungan yang rasional, seperti sistem sewa. Dengan berkurangnya akses anggota keluarga terhadap penguasaan, pemanfaatan dan pemilikan harta pusaka dan menguatnya sistem sewa secara langsung akan akan mempercepat penambahan keluarga miskin dalam masyarakat. Hal ini disebabkan karena jaring pengaman sosial tidak lagi tersedia dalam masyarakat.

Sejak tahun 1980, semakin pentingnya peranan Pasar Padang Luar sebagai sentral distribusi sayur mayur dan palawija di Sumatera Barat, Riau dan Jambi, secara langsung berpengaruh terhadap pola penguasaan tanah dalam masyarakat. Sistem sewa tanah yang terjadi dalam masyarakat, di dorong oleh kebutuhan petani dan pedagang sayur mayur dan palawija, untuk memperoleh uang tunai dalam waktu cepat, dan tidak beresiko, berbeda dengan sistem pagang gadai yang sangat beresiko, seringkali pihak yang menggadaikan tanah tidak mampu menebus tanah yang telah digadaikannya. Sedangkan dalam sistem sewa tanah, pihak yang menyewakan tanahnya akan memperoleh sejumlah uang dari pihak penyewa, dan uang yang diterima tidak perlu dikembalikan, karena merupakan harga sewa. Sesuai dengan perjanjian, jangka waktu menyewakan tanah, biasanya selama satu tahun tanaman.

Harga sewa tanah bervariasi, dan tergantung kepada kesuburan tanah. Menurut masyarakat, kesuburan tanah sangat ditentukan

sekali oleh ketersediaan air dari areal pertanian tersebut. Faktor ketersediaan air disamping memberikan pengaruh pada kesuburan tanah, juga berpengaruh terhadap harga lahan pertanian, baik dalam arti sewa maupun dalam arti jual. Ketersediaan air juga berpengaruh pada lamanya waktu sewa. Besarnya sewa, untuk lahan pertanian basah, katagori ketersediaan air cukup dibandingkan dengan lahan pertanian basah, katagori ketersediaan air terbatas, dua berbanding satu. Kalau harga sewa untuk lahan ketersediaan air cukup Rp 200.000,- maka untuk katagori ketersediaan terbatas Rp 100.000,-

Terlihat ada kecendrungan masyarakat untuk menyewa lahan pertanian basah, katagori ketersediaan air cukup, walau harga sewanya mahal. Menurut salah seorang petani, kenapa mereka lebih senang menyewa lahan lahan pertanian, yang harga sewanya mahal, lebih disebabkan karena rendahnya biaya produksi dan hasil yang diperoleh cukup baik. rendahnya biaya produksi, terutama berkaitan dengan tenaga kerja dalam pengolahan lahan pertanian. Seorang Petani mengemukakan, pada lahan pertanian basah, katagori ketersediaan air cukup, pengolahan lahan lebih mudah, wanita dan anak-anak dalam mengerjakan-nya, sedangkan untuk katagori lahan pertanian ketersediaan air terbatas, pada saat pengolahan awal tenaga laki-laki sangat diperlukan.

Mengingat terbatasnya lahan pertanian basah, ada beberapa keluarga yang menyewa lahan pertanian di nagari. Satu keluarga yang ditemui mampu menyewa lahan pertanian di nagari tetangga sebesar Rp 300.000,- selama satu tahun dalam arti 12 bulan. Saat ditanyakan kepada petani, mengingat besarnya sewa yang harus dibayarkan, sementara hasil dari lahan belum jelas. Informan mengatakan, tidak menjadi masalah harga sewa sebesar itu, karena memang hasilnya juga baik. Pengalaman menunjukkan, sudah tiga tahun menyewa lahan pertanian tersebut, kami tetap saja memperoleh keuntungan yang cukup besar. Namun ada juga diantara mereka yang mengalami kerugian, karena tanaman mereka di serang hama, sehingga gagal panen. Sisi lain, informasi yang diperoleh dari keluarga pemilik lahan, alasan menyewakan lahan adalah untuk memperoleh uang tunai yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Saat dilacak terus, sangat susah sekali

diperoleh informasi berkaitan dengan kebutuhan keluarga dalam arti yang bagaimana.

Berkembangnya Pasar Padang Luar sebagai sentral perdagangan sayur dan palawija di Sumatra Barat, secara langsung telah menimbulkan pembagian keuntungan yang tidak merata, dan dampak sosial ekonomi lainnya pada masyarakat, karena yang lebih diuntungkan adalah petani kaya. Pemilik tanah lebih menyukai sistem sewa menyewa dengan pembayaran di muka, hal ini disebabkan karena pemilik tanah ingin mendapat kepastian dan tidak menanggung resiko apabila panen gagal.

V. SIMPULAN

Fragmentasi pemilikan tanah yang disebabkan oleh tekanan demografis sudah sangat mengkawatirkan pada masyarakat Nagari Sungai Tanang. Kecilnya kepemilikan tanah pada setiap keluarga pada masyarakat Sungai Tanang menjadi salah satu faktor penyebab kemiskinan. Ideologi komunalistik menjadi kenangan digantikan oleh ideologi individualistik. Kecendrungan dekomunalisasi tanah komunal pada masyarakat Sungai Tanang berimplikasi terhadap melemahnya solidaritas sosial dan kurang berfungsinya jaring pengaman sosial yang berbasis pada keluarga dan masyarakat.

Menurut Wolf (1983: 2), pada masa lampau petani tidak melakukan usaha tani dalam arti ekonomis, mereka hanya mengelola suatu rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok. Masyarakat petani akan menghentikan usaha produktif di lahan, apabila kebutuhan minimum dari keluarga sudah terjamin. Tujuannya adalah untuk mempertahankan keseimbangan antara kemampuan sumber daya yang tersedia dan tuntutan dari luar. Berbeda dengan apa yang ditemukan pada masyarakat Sungai Tanang, dimana usaha tani dilakukan masyarakat mempertimbangkan nilai ekonomis dari usaha tani yang dilakukan sebagai akibat dari besaran penguasaan dan pemilikan lahan pertanian. Keadaan ini berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang diambil petani terhadap jenis komoditi yang ditanam di lahan pertanian ditentukan oleh permintaan pasar. Pilihan-pilihan yang dilakukan petani terhadap tanaman padi atau tanaman sayur-mayur dan palawija yang

ditanam di lahan pertanian merupakan strategi penyelamatan dan wujud dari kerentanan petani, saat dihadapkan pada kecilnya penguasaan dan pemilikan lahan pertanian.

Pola hubungan kerja dalam bidang pertanian, dalam beberapa hal memperlihatkan lemahnya bargaining petani dengan pedagang, antara lain; para petani terikat secara ekonomi dengan pedagang pengumpul dan pemilik tanah; kelangkaan tanah dan modal, membuat petani memelihara hubungan dengan pedagang dan pemilik tanah. Sesama petani, karena adanya banyak kesamaan, membuat petani mengembangkan berbagai mekanisme sosial ekonomi untuk bertahan hidup, dalam bentuk menciptakan berbagai wadah, seperti, tolong menolong dalam pengrajin lahan pertanian yang didasarkan pada hubungan ketetanggaan dan kesamaan pekerjaan. Strategi yang dilakukan masyarakat untuk mengatasi kelangkaan modal dan kesulitan dalam memperoleh uang dalam jumlah tertentu dengan mengikuti kelompok arisan atau julo-julo, sementara koperasi dan lembaga keuangan modern, seperti perbankan belum digunakan oleh petani.

Menguatnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian, telah melahirkan cara-cara yang rasional dikembangkan oleh petani untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pola-pola yang dipertahankan oleh petani, terlihat tidak rasional menurut orang luar sebenarnya merupakan sesuatu yang rasional, karena petani tidak memiliki pilihan. Dalam konteks itu, sebagaimana yang dikemukakan Scots sebagai bentuk atau cara memenuhi kebutuhan subsistensi petani.

Para petani menilai pola kerjasama dengan pedagang dan dengan petani pemilik dengan sistem sewa merupakan pola kerja sama yang saling menguntung. Namun ke depan, diharapkan berbagai program anti kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat mengakomodasi persoalan yang dihadapi petani, terutama dalam bentuk permodalan, dengan memperkuat modal dalam organisasi atau kelompok yang dimiliki petani. Sejalan dengan itu, diharapkan pemerintah dapat merancang sistem sewa tanah yang berkeadilan dalam pembagian resiko pada saat petani gagal panen, *necessary conditions* untuk memperkecil ketergantungan petani dengan pedagang. Pola pemberdayaan yang selama

ini dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dapat dilakukan pada masyarakat petani dengan kerangka pemberdayaan sebagai berikut: Pertama, mengingat kelompok petani termasuk dalam katagori petani subsistensi maka perlu dialokasi modal dalam bentuk hibah agar petani keluar

dari ekonomi subsistensi; Kedua, kelompok potensial diberdayakan dengan alokasi modal yang bersifat revolving, agar kelompok petani bisa mandiri; Ketiga, petani yang mandiri didekati dengan lembaga keuangan moderen (perbankan), untuk dapat memperoleh kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Benda-Beckmann, F.V. et al. 1988.a. "Introducing: Between Kinship and the State". in Benda-Beckman, F.V. et al (eds.), *Between Kinship and the State*. Foris Publications, Dordrecht.
- Benda-Beckmann, F.Von. and Benda-Beckmann, K.Von and Hans Marks, 1994. *Coping With Insecurity, An Underall Persepctive on Social Security in The World*. Stichting Focaal, Nijmegen.
- Biezeveld, R, 2002. *Between Individualism and Mutual Help; Social security and natural resources in a Minangkabau village*. Delft, Uitgeverij Eburon.
- Chaudry, S. 2002. Indegenous Community-Based Property Rights in India: Public or Private?. Artikel dalam XIII th International Congress Legal Pluralism and Unofficial Law in Social, Economic and Political Developmen. 7-10 April, Chiang Mai, Thailand.
- Erwin, 2006. *Tanah Komunal: Memudarnya Solidaritas Sosial pada Masyarakat Matrilineal Minangkabau*. Andalas University Press, Padang.
- Erwin, 1994. Perubahan dari Nagari ke Desa dan Pengaruhnya terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan. Thesis S2, Bandung, Universitas Padjadjaran.
- _____, 2001. "Dinamika Pengorganisasian Jaminan Sosial dalam keluarga pada Masyarakat Petani di Pedesaan Minangkabau", F&K von Benda Beckmann, Koning (eds) *Sumber Daya Alam dan Jaminan Sosial*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Mosher, A.T. *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*. CV. Yasaguna, Jakarta.
- Murphree,M.1996. Common Property Resources: Issues an Social Policy. Occasional paper of the centre for Applied social Sciences. University of Zimbabwe, Harare.
- Winarno, B. 2003. *Komparasi Organisasi Perdesaaan dalam Pembangunan*, Media Pressindo, Yogyakarta.
- Wolf, Eric R, 1983. *Petani Suatu Tinjauan Antropologis*. Jakarta, CV. Radjawali.
- Scott, James C, 1981. *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta, LP3ES.

BIODATA PENULIS:

Dr. Erwin, M.Si Dosen Jurusan Antropologi, FISIP Universitas Andalas